

INFLASI DAN DAYA BELI:

Mengapa Rumah Tangga Indonesia
Masih Merasakan Tekanan pada 2026



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Inflasi dan Daya Beli: Mengapa Rumah Tangga
Indonesia Masih Merasakan Tekanan pada 2026*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

1 April 2026

INFLASI DAN DAYA BELI: MENGAPA RUMAH TANGGA INDONESIA MASIH MERASAKAN TEKANAN PADA 2026

Abstrak

Makalah ini membahas paradoks ekonomi Indonesia pada awal 2026: di satu sisi, indikator makro menunjukkan ketahanan yang cukup baik; di sisi lain, banyak rumah tangga masih merasakan tekanan pada daya beli. Data resmi menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, neraca perdagangan Januari 2026 masih surplus, keyakinan konsumen tetap optimistis, dan penjualan eceran riil meningkat menjelang Ramadan. Namun, inflasi tahunan meningkat dari 3,55 persen pada Januari 2026 menjadi 4,76 persen pada Februari 2026, berada di atas sasaran inflasi Bank Indonesia $2,5 \pm 1$ persen. Kenaikan ini terutama dipengaruhi normalisasi tarif listrik dan efek basis rendah, tetapi rumah tangga juga menghadapi tekanan nyata dari harga pangan, biaya hidup perkotaan, kualitas pekerjaan yang belum merata, lambatnya transmisi penurunan suku bunga ke kredit, serta pemulihan UMKM yang belum sepenuhnya kuat. Makalah ini berargumen bahwa tekanan daya beli pada 2026 tidak dapat dibaca hanya dari inflasi umum, melainkan harus dipahami melalui kombinasi antara arus kas rumah tangga, struktur pengeluaran kebutuhan pokok, kerentanan pekerjaan, dan distribusi manfaat pertumbuhan. Dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data resmi hingga Maret 2026,

makalah ini menunjukkan bahwa masalah utama Indonesia bukan semata rendahnya pertumbuhan, melainkan ketidaksejajaran antara ketahanan makro dan kenyamanan ekonomi mikro. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi harus dipadukan dengan peningkatan kualitas pekerjaan, stabilisasi harga pangan, transmisi kredit yang lebih efektif, dan perlindungan sosial yang lebih presisi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: inflasi, daya beli, rumah tangga Indonesia, biaya hidup, kebijakan moneter, harga pangan, UMKM, 2026

Inflasi dan Daya Beli: Mengapa Rumah Tangga Indonesia Masih Merasakan Tekanan pada 2026

Pendahuluan

Pada pandangan pertama, ekonomi Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi yang tidak buruk. Produk domestik bruto tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibanding 2024. Neraca perdagangan Januari 2026 masih mencatat surplus sekitar US\$0,95 miliar. Bank Dunia juga menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, dengan pertumbuhan yang diproyeksikan bertahan di sekitar 5 persen pada 2026-2027. Bahkan, survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa keyakinan konsumen Februari 2026 tetap berada pada zona optimistis, dan penjualan eceran riil diperkirakan tumbuh 6,9 persen secara tahunan. Secara makro, gambaran ini terlihat seperti kisah resiliensi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, pengalaman rumah tangga sering kali tidak identik dengan narasi makroekonomi. Bagi keluarga pekerja, pedagang kecil, pengemudi daring, pegawai swasta muda, atau pelaku usaha mikro, pertanyaan yang paling

relevan bukanlah apakah PDB tumbuh, melainkan apakah gaji, omzet, dan pendapatan harian cukup untuk menutup tagihan listrik, sewa rumah, biaya sekolah, transportasi, cicilan, dan harga bahan pokok. Di sinilah muncul jarak antara statistik makro dan persepsi kesejahteraan sehari-hari. Dalam banyak kasus, masyarakat dapat hidup di tengah ekonomi yang “tumbuh”, tetapi tetap merasa tertekan karena ruang gerak keuangannya menyempit. Kesadaran atas perbedaan ini penting agar analisis ekonomi tidak berhenti pada agregat, melainkan masuk ke realitas rumah tangga.

Data inflasi awal 2026 menunjukkan sumber utama paradoks tersebut. Menurut BPS, inflasi tahunan Januari 2026 sebesar 3,55 persen, lalu naik menjadi 4,76 persen pada Februari 2026. Bank Indonesia menegaskan bahwa lonjakan ini terutama dipengaruhi oleh faktor temporer, yakni efek basis rendah akibat diskon tarif listrik rumah tangga 50 persen pada Januari-Februari 2025, sehingga ketika diskon itu tidak lagi berlaku, inflasi tahunan tampak melonjak. Akan tetapi, walaupun dari sudut statistik kenaikan ini bersifat “temporer”, dari sudut pandang rumah tangga pengeluaran aktual untuk listrik dan kebutuhan lain tetap terasa lebih berat. Dengan kata lain, suatu faktor bisa bersifat temporer secara makro, tetapi tetap nyata secara kas rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini bertujuan menjawab pertanyaan: **mengapa rumah tangga Indonesia masih merasakan tekanan pada daya beli pada 2026, meskipun beberapa indikator makro menunjukkan ketahanan?**

Argumen utama makalah ini adalah bahwa tekanan tersebut lahir dari kombinasi enam faktor: kenaikan inflasi yang sangat terasa pada pengeluaran rutin; volatilitas harga pangan; pertumbuhan pendapatan yang tidak selalu sejalan dengan biaya hidup; kualitas pekerjaan yang belum cukup baik; transmisi pelonggaran moneter yang belum penuh ke suku bunga kredit; dan distribusi manfaat pertumbuhan yang belum merata antar kelompok rumah tangga. Karena itu, jawaban atas masalah

daya beli tidak cukup dicari dalam inflasi headline semata, tetapi harus dipahami sebagai persoalan struktur ekonomi rumah tangga.

Kerangka Analitis: Inflasi, Daya Beli, dan Tekanan yang Dirasakan

Dalam analisis ekonomi rumah tangga, daya beli tidak identik dengan jumlah rupiah yang diterima, tetapi dengan kemampuan pendapatan tersebut untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Dua rumah tangga yang menerima pendapatan nominal yang sama dapat merasakan kesejahteraan yang berbeda jika struktur pengeluarannya berbeda. Rumah tangga yang sebagian besar anggarannya habis untuk kebutuhan primer akan jauh lebih sensitif terhadap kenaikan harga makanan, listrik, transportasi, dan sewa, dibanding rumah tangga yang masih memiliki ruang untuk tabungan dan konsumsi non-esensial. Karena itu, tekanan daya beli selalu bersifat distribusional: siapa yang belanja untuk apa, dengan pendapatan berapa, dan seberapa besar ruang amannya.

Kerangka ini penting bagi Indonesia pada 2026 karena inflasi tidak naik secara seragam pada semua komponen, dan tekanan biaya hidup juga tidak menyentuh semua kelompok secara sama. Bank Indonesia menunjukkan bahwa inflasi inti Februari 2026 tetap relatif terkendali di 2,63 persen, sedangkan kelompok volatile food mencapai 4,64 persen secara tahunan, dan administered prices melonjak 12,66 persen secara tahunan terutama akibat efek basis dari diskon tarif listrik 2025. Artinya, masalah daya beli pada awal 2026 lebih dekat dengan komoditas yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga—makanan dan komponen harga yang diatur pemerintah—daripada dengan kenaikan yang merata di seluruh barang. Ini menjelaskan mengapa masyarakat dapat merasakan tekanan kuat meski sebagian analis menekankan bahwa lonjakan inflasi bersifat temporer. ([Bank Indonesia](#))

Selain itu, persepsi rumah tangga dipengaruhi bukan hanya oleh tingkat harga, tetapi oleh arus kas bulanan. Tagihan yang jatuh tempo, cicilan yang harus dibayar, dan kebutuhan pangan harian lebih menentukan rasa aman

ekonomi dibanding abstraksi tahunan seperti inflasi rata-rata. Dalam konteks ini, kenaikan biaya yang terkonsentrasi pada item-item berfrekuensi tinggi—seperti listrik, beras, ayam, cabai, minyak goreng, atau transportasi—sering kali terasa lebih berat daripada kenaikan pada barang yang jarang dibeli. Dari perspektif ekonomi perilaku, harga yang sering dilihat dan sering dibayar memiliki dampak psikologis lebih besar terhadap persepsi inflasi. Oleh sebab itu, analisis daya beli pada 2026 harus menggabungkan data resmi dengan logika pengalaman rumah tangga.

Potret Ekonomi Indonesia pada Awal 2026

Bila dilihat dari sisi agregat, Indonesia memang tidak sedang berada dalam situasi krisis. Pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,11 persen, dan triwulan IV-2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi sepanjang 2025, sementara pada awal 2026 neraca perdagangan tetap surplus. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga sama-sama menegaskan bahwa permintaan domestik, investasi, dan belanja pemerintah masih menjadi penopang ekonomi. Di sisi fiskal, realisasi APBN sampai 28 Februari 2026 menunjukkan penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen secara tahunan dan belanja tumbuh 41,9 persen, menggambarkan fungsi fiskal yang aktif sebagai penyangga ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sisi moneter, BI mempertahankan BI-Rate pada 4,75 persen pada Maret 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah, sekaligus menjaga agar inflasi 2026-2027 kembali ke sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Pada saat yang sama, Bank Indonesia menegaskan bahwa inflasi IHK Februari 2026 sebesar 4,76 persen terutama didorong faktor basis, sementara inflasi inti tetap terjaga. Jadi, bank sentral melihat masalah yang terjadi bukan sebagai ledakan inflasi yang tidak terkendali, melainkan sebagai gabungan

antara shock temporer, risiko eksternal, dan kebutuhan menjaga ekspektasi. ([Bank Indonesia](#))

Akan tetapi, stabilitas makro tidak otomatis meniadakan tekanan mikro. Survei Konsumen BI Februari 2026 memang menunjukkan IKK 125,2, yang berarti rumah tangga secara umum masih optimistis. Persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini juga naik, dengan Indeks Penghasilan Saat Ini 125,0, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja 110,7, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama 112,0. Namun jika dilihat lebih dalam, optimisme itu tidak homogen. IKK tertinggi berada pada responden dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan, dan pada kelompok pengeluaran Rp1-2 juta, indeks pembelian barang tahan lama turun menjadi 99,1, yaitu di bawah ambang optimisme. Artinya, rumah tangga bawah dan menengah bawah mulai lebih berhati-hati terhadap konsumsi barang yang dapat ditunda. ([Bank Indonesia](#))

Temuan ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa ketika makroekonomi tampak baik, rumah tangga berpendapatan lebih tinggi masih mampu menjaga optimisme, tetapi kelompok berpengeluaran lebih rendah sudah menunjukkan gejala penyesuaian. Di sinilah konsep “rata-rata nasional” menjadi menyesatkan bila tidak dibaca secara distribusional. Optimisme agregat bukan berarti semua orang merasa aman; bisa jadi yang terjadi adalah kelompok atas cukup nyaman, sementara kelompok bawah menahan pembelian dan beradaptasi.

Mengapa Tekanan Daya Beli Masih Terasa?

1. Kenaikan inflasi headline terasa nyata dalam pengeluaran rutin

Penjelasan pertama terletak pada sifat inflasi itu sendiri. Pada Januari 2026, inflasi tahunan masih 3,55 persen; pada Februari melonjak menjadi 4,76 persen. Kenaikan ini memang banyak dijelaskan oleh low-base effect dari diskon tarif listrik 2025. Tetapi bagi rumah tangga, yang dirasakan bukan “efek basis”, melainkan hilangnya diskon yang dulu sempat meringankan

tagihan. Dalam bahasa sederhana, jika pada awal 2025 sebuah keluarga menikmati potongan besar listrik, maka ketika potongan itu tak lagi ada pada 2026, uang tunai yang harus disediakan setiap bulan memang lebih besar. Dari sinilah muncul perbedaan antara penjelasan statistik dan pengalaman ekonomi konkret. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia mencatat bahwa kelompok administered prices secara tahunan naik 12,66 persen pada Februari 2026, meski secara bulanan justru deflasi tipis 0,03 persen karena harga BBM nonsubsidi turun. Secara teknis, ini berarti lonjakan tahunan tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan harga baru yang sedang meluas. Namun bagi rumah tangga, kenaikan pada komponen harga yang diatur pemerintah memiliki daya tekan besar karena sering berkaitan dengan utilitas dan transportasi—dua pos yang sukar dihindari. Rumah tangga dapat menunda membeli pakaian baru atau gawai, tetapi tidak dapat lama menunda pembayaran listrik, bahan bakar, atau ongkos perjalanan ke tempat kerja. Karena itu, walaupun sebagian inflasi 2026 bersifat temporer, tekanan yang dirasakan tetap riil. ([Bank Indonesia](#))

2. Harga pangan tetap menjadi sumber kecemasan rumah tangga

Faktor kedua adalah pangan. Pada Februari 2026, inflasi volatile food mencapai 4,64 persen secara tahunan. BI menyebut komoditas penyumbang utamanya antara lain daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah, yang terdorong oleh kenaikan permintaan selama Ramadan serta penurunan pasokan akibat gangguan cuaca. Sebelumnya pada Januari 2026, volatile food memang sempat mengalami deflasi bulanan karena pasokan cabai dan bawang meningkat saat panen. Artinya, rumah tangga memasuki 2026 dengan pola harga pangan yang cepat berubah: sempat reda, lalu kembali naik. Fluktuasi seperti ini menciptakan rasa tidak pasti, terutama bagi keluarga yang anggaran makannya sangat ketat. ([Bank Indonesia](#))

Dalam kehidupan sehari-hari, pangan adalah pos yang paling sering dibeli dan paling mudah diamati. Seorang ibu rumah tangga mungkin tidak hafal angka inflasi nasional, tetapi ia tahu ketika harga ayam di pasar naik, cabai menjadi lebih mahal, dan uang belanja harian tidak lagi cukup. Karena frekuensi pembelian pangan sangat tinggi, kenaikan kecil pun terasa lebih besar secara psikologis. Di sinilah sebabnya inflasi pangan memiliki “daya resonansi sosial” yang lebih kuat dibanding banyak komponen lain dalam indeks harga konsumen.

Indonesia memang memiliki instrumen pengendalian inflasi pangan melalui TPIP, TPID, Bulog, dan berbagai operasi stabilisasi. Tetapi pengendalian tersebut menghadapi tantangan struktural: cuaca, distribusi antardaerah, biaya logistik, dan kesenjangan informasi harga. Ketika gangguan cuaca menurunkan pasokan cabai atau ayam, kenaikan harga dapat menyebar cepat ke banyak pasar. Rumah tangga lalu harus menyesuaikan menu, mengurangi porsi, atau mengalihkan belanja ke barang lain. Penyesuaian semacam ini tidak selalu tercermin sebagai “krisis”, tetapi cukup untuk menciptakan tekanan kesejahteraan yang persisten.

3. Pendapatan nominal naik, tetapi ruang aman rumah tangga tetap tipis

Tekanan daya beli juga berkaitan dengan kemampuan pendapatan untuk menyerap kenaikan biaya hidup. BPS mencatat rata-rata upah buruh pada November 2025 sebesar Rp3,33 juta, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,74 persen. Data ini menunjukkan bahwa pasar kerja membaik secara agregat. Namun, perbaikan kuantitas kerja tidak otomatis berarti kualitas pendapatan sudah cukup. Upah rata-rata tersebut masih menunjukkan bahwa banyak pekerja Indonesia hidup dengan buffer keuangan yang terbatas, terutama di wilayah perkotaan yang biaya hidupnya lebih tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Masalah kualitas pekerjaan juga ditegaskan oleh World Bank. Dalam Indonesia Country Growth and Jobs Report, Bank Dunia menunjukkan bahwa pangsa pekerja pada pekerjaan berketerampilan tinggi masih rendah dan stagnan, bahkan lulusan universitas makin banyak mengambil pekerjaan berketerampilan rendah. Ini berarti sebagian pasar kerja Indonesia memang berhasil menciptakan pekerjaan, tetapi belum cukup banyak menciptakan **good jobs**—pekerjaan dengan produktivitas, stabilitas, dan tingkat upah yang mampu menopang kenaikan standar hidup. Dalam kondisi seperti ini, sedikit saja ada gangguan pada harga kebutuhan pokok, rumah tangga cepat merasa tertekan.

Dengan kata lain, persoalan 2026 bukan sekadar “harga naik”, tetapi “harga naik dalam struktur pendapatan yang buffer-nya tipis”. Sebuah keluarga dengan dua sumber pendapatan informal mungkin tetap bekerja penuh, namun jika salah satu pendapatan menurun atau pengeluaran makan naik beberapa ratus ribu rupiah per bulan, seluruh anggaran menjadi tegang. Karena itu, tekanan daya beli sering kali merupakan gejala dari kualitas pertumbuhan dan kualitas pekerjaan, bukan semata hasil dari CPI bulanan.

4. Ketahanan makro tidak sama dengan kenyamanan mikro

Salah satu sebab mengapa publik tetap merasa tertekan adalah karena indikator makro menangkap rata-rata, sedangkan rumah tangga hidup dalam distribusi. BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 23,36 juta orang atau 8,25 persen. Ketimpangan pengeluaran juga menurun, dengan gini ratio nasional mencapai 0,363. Namun, angka-angka ini tidak berarti tekanan hilang. Sebanyak 23,36 juta orang tetap berada di bawah garis kemiskinan, dan banyak rumah tangga yang berada sedikit di atas garis itu secara logis sangat sensitif terhadap kenaikan harga makanan, listrik, dan transportasi. Selain itu, ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi daripada di perdesaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pembacaan yang lebih hati-hati terhadap data ketimpangan juga menunjukkan bahwa rata-rata nasional dapat menutupi tekanan kelas menengah bawah perkotaan. Di kota besar, sewa, ongkos transportasi, biaya pendidikan, dan utilitas jauh lebih dominan dalam anggaran. Maka, ketika inflasi listrik atau pangan muncul, dampaknya terasa lebih langsung. Secara statistik ketimpangan mungkin membaik, tetapi secara pengalaman hidup rumah tangga urban, rasa terdesak tetap bisa meningkat. Inilah sebabnya opini publik tentang ekonomi sering kali lebih muram daripada yang ditunjukkan indikator pertumbuhan.

5. Pelonggaran moneter belum sepenuhnya terasa di kredit rumah tangga

Penjelasan berikutnya berasal dari sektor keuangan. BI memang telah menurunkan suku bunga kebijakan total 150 basis poin sejak September 2024, dan pada Maret 2026 BI-Rate bertahan di 4,75 persen. Namun transmisi ke bunga kredit masih terbatas. Bank Indonesia mencatat suku bunga kredit per Februari 2026 berada di 8,80 persen, hanya turun 40 basis poin dari Januari 2025. BI juga menegaskan bahwa persyaratan penyaluran kredit memang makin longgar, tetapi tidak pada segmen kredit konsumsi dan UMKM karena risiko di dua segmen itu masih tinggi. ([Bank Indonesia](#))

Bagi rumah tangga, fakta ini penting. Ketika suku bunga kebijakan turun tetapi bunga kredit masih relatif tinggi, maka biaya pinjaman rumah tangga tidak banyak berkurang. Cicilan kendaraan, kredit usaha kecil, kredit multiguna, atau pembiayaan lain tetap menyerap bagian signifikan dari pendapatan. Hal ini membuat pelonggaran moneter terasa “jauh” dari dapur rumah tangga. Secara kebijakan, ruang moneter memang lebih akomodatif; tetapi secara pengalaman konsumen, keringanannya belum sepenuhnya masuk ke tagihan bulanan.

Survei Konsumen BI menunjukkan rata-rata proporsi pendapatan untuk konsumsi pada Februari 2026 sebesar 71,6 persen, proporsi cicilan/utang 10,6 persen, dan tabungan 17,7 persen. Angka ini bisa dibaca ganda. Di

satu sisi, rumah tangga secara agregat masih mampu menabung. Di sisi lain, proporsi konsumsi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan tetap habis untuk kebutuhan rutin. Ketika anggaran konsumsi menyerap lebih dari dua pertiga pendapatan, ruang aman menghadapi kenaikan harga menjadi tipis. Di kelompok pendapatan bawah, ruang itu tentu lebih sempit lagi. Bahkan pada kelompok pengeluaran Rp1-2 juta, indeks pembelian barang tahan lama turun ke bawah 100, menandakan preferensi menahan belanja. Secara analitis, ini menunjukkan mekanisme adaptasi defensif, bukan kenyamanan. ([Bank Indonesia](#))

6. Pemulihan UMKM belum merata, padahal banyak rumah tangga bergantung padanya

Daya beli rumah tangga Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi UMKM karena jutaan keluarga menggantungkan pendapatan pada usaha kecil, perdagangan mikro, jasa rumahan, atau kegiatan informal yang dekat dengan ekosistem UMKM. OJK mencatat kredit UMKM per Januari 2026 sebesar Rp1.482,9 triliun, tetapi secara tahunan mengalami moderasi 0,53 persen. OJK menilai fundamental UMKM tetap terjaga, namun juga menjelaskan bahwa perlambatan tersebut dipengaruhi dinamika ekonomi global dan nasional, serta pemulihan UMKM pascapandemi yang lebih lambat daripada sektor korporasi. ([OJK Portal](#))

Implikasinya jelas: jika sektor korporasi pulih lebih cepat daripada usaha mikro, maka manfaat pertumbuhan tidak otomatis meresap ke basis rumah tangga. Seorang pemilik warung, penjual makanan kecil, atau produsen rumahan dapat tetap beroperasi, tetapi omzetnya belum tentu tumbuh cukup untuk mengejar kenaikan biaya bahan baku, sewa, dan energi. Dalam situasi seperti ini, daya beli rumah tangga pelaku UMKM terasa terjepit dari dua arah: sebagai konsumen mereka membayar harga lebih tinggi, sebagai produsen mereka belum tentu mampu menaikkan margin secara proporsional.

Kondisi ini juga menjelaskan mengapa keluhan ekonomi sering terdengar kuat di lapisan masyarakat produktif yang sebenarnya tidak tergolong miskin. Mereka masih bekerja, masih berusaha, dan masih berbelanja, tetapi margin keuangannya menipis. Inilah bentuk tekanan yang khas pada masa pemulihan yang tidak merata: orang tidak jatuh sekaligus, melainkan berjalan lebih lambat, lebih cemas, dan lebih rentan terhadap shock kecil.

7. Tekanan eksternal memperbesar rasa tidak pasti

Walaupun masalah daya beli tampak domestik, ia tidak lepas dari faktor eksternal. BI menyatakan bahwa perang di Timur Tengah memperburuk prospek ekonomi global dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan. Rupiah ditutup di kisaran Rp16.870 per dolar AS pada 19 Februari 2026, lalu pada 16 Maret 2026 tercatat sekitar Rp16.985 per dolar AS. Bank Indonesia juga mengingatkan bahwa naiknya harga minyak global perlu diwaspadai karena dapat memperlebar defisit transaksi berjalan ke batas atas kisaran yang diproyeksikan. ([Bank Indonesia](#))

Bagi rumah tangga, pelemahan rupiah tidak selalu langsung terlihat sebagai angka kurs, tetapi sebagai potensi kenaikan harga barang impor, bahan baku, pakan, obat, atau barang konsumsi tertentu. Bahkan jika pass-through ke inflasi inti relatif terkendali, ekspektasi masyarakat bisa berubah lebih cepat daripada data resmi. Ketika publik mendengar rupiah melemah dan minyak dunia berisiko naik, mereka cenderung bersikap hati-hati: menahan konsumsi besar, meningkatkan tabungan berjaga-jaga, dan mempersempit pengeluaran non-esensial. Tekanan daya beli karenanya tidak hanya muncul dari apa yang sudah terjadi pada harga, tetapi juga dari apa yang dikhawatirkan akan terjadi.

Ilustrasi Naratif: Sebuah Rumah Tangga Perkotaan pada 2026

Bayangkan sebuah rumah tangga muda di kota penyangga Jakarta atau Bandung. Suami bekerja sebagai staf administrasi dengan penghasilan sekitar Rp4,5 juta per bulan. Istri membantu menambah pendapatan

melalui usaha makanan kecil berbasis pesanan. Mereka menyewa rumah sederhana, membayar listrik, air, biaya transportasi, pulsa data, dan cicilan motor. Ketika harga ayam dan cabai naik menjelang Ramadan, biaya produksi makanan rumahan ikut naik. Ketika diskon listrik tahun lalu tidak ada lagi, tagihan terasa lebih berat. Pendapatan suami nominalnya tetap, tetapi biaya rutin bertambah. Omzet usaha istri masih ada, tetapi margin menipis karena tidak semua kenaikan biaya bisa dibebankan ke pelanggan.

Dalam situasi seperti itu, keluarga ini belum tentu jatuh miskin. Mereka masih bekerja, masih bisa membayar tagihan, dan mungkin masih menabung sedikit. Namun mereka mulai menunda membeli kulkas baru, mengurangi makan di luar, menawar harga lebih keras di pasar, dan menjadi lebih sensitif terhadap isu kenaikan harga. Secara statistik, mereka ikut menyumbang konsumsi nasional yang tetap tumbuh. Tetapi secara pengalaman hidup, mereka merasa ekonomi “sedang berat”. Gambaran inilah yang menjelaskan mengapa data makro dan rasa sosial bisa bergerak ke arah berbeda.

Narasi tersebut sesuai dengan temuan Survei Konsumen BI Februari 2026. Secara agregat, keyakinan konsumen masih optimistis, tetapi kelompok berpengeluaran lebih rendah lebih rapuh. Indeks pembelian barang tahan lama kelompok Rp1-2 juta turun ke 99,1, sementara proporsi pendapatan untuk konsumsi tetap besar. Artinya, banyak rumah tangga tidak berhenti berbelanja kebutuhan pokok, tetapi mulai menunda konsumsi yang dapat ditangguhkan. Dalam bahasa ekonomi, mereka bukan kolaps, melainkan melakukan **coping adjustment**. Dalam bahasa kehidupan sehari-hari, mereka “masih jalan, tetapi terasa sempit.” ([Bank Indonesia](#))

Menjelaskan Paradoks 2026: Resilien di Makro, Rapuh di Mikro

Dari uraian di atas, jelas bahwa tekanan daya beli rumah tangga Indonesia pada 2026 lahir dari paradoks yang khas. Pertama, ekonomi nasional masih tumbuh, perdagangan masih surplus, dan konsumsi belum runtuh. Kedua, inflasi headline naik cukup tajam, tetapi sebagian besar didorong faktor

temporer low-base effect. Ketiga, inflasi yang paling “terasa” justru datang dari komponen yang sangat penting dalam pengeluaran rumah tangga, yaitu listrik dan pangan. Keempat, pasar kerja membaik secara kuantitas, tetapi kualitas pekerjaan dan buffer pendapatan masih belum memadai. Kelima, pelonggaran moneter ada, tetapi transmisi ke bunga kredit rumah tangga belum penuh. Keenam, kelompok pendapatan rendah dan pelaku UMKM menerima tekanan lebih besar dibanding kelompok atas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, pertanyaan “apakah daya beli membaik atau memburuk?” sebenarnya terlalu sederhana. Jawaban yang lebih tepat adalah: **daya beli Indonesia pada 2026 terfragmentasi**. Ada rumah tangga yang relatif aman karena pendapatannya lebih tinggi dan tabungannya masih cukup. Ada rumah tangga yang tetap optimistis tetapi berhati-hati. Ada pula yang secara kas harian sudah merasakan penyempitan, terutama karena pengeluaran primer menyerap terlalu banyak pendapatan. Perbedaan pengalaman inilah yang membuat diskursus publik tentang ekonomi sering terasa kontradiktif.

Implikasi Kebijakan

Pertama, pengendalian inflasi harus lebih diarahkan pada komponen yang paling dekat dengan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks 2026, itu berarti stabilisasi pangan dan komunikasi kebijakan harga yang diatur pemerintah. Jika lonjakan inflasi headline banyak disebabkan low-base effect listrik, pemerintah dan otoritas ekonomi harus menjelaskan dengan jernih bahwa efek statistik tersebut tidak boleh menutup kebutuhan menjaga biaya utilitas tetap terjangkau bagi kelompok rentan. Komunikasi publik yang baik penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan hanya karena perbedaan bahasa antara teknokrasi dan pengalaman sehari-hari. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kedua, kebijakan pangan harus bergerak dari reaktif ke preventif. Penguatan cadangan pangan, perbaikan distribusi antardaerah, integrasi

data produksi dan harga, serta intervensi lebih awal pada komoditas strategis perlu menjadi prioritas. Selama volatile food tetap menjadi sumber utama kecemasan rumah tangga, maka stabilitas sosial-ekonomi akan selalu rapuh. Di negara seperti Indonesia, keberhasilan kebijakan inflasi sering ditentukan bukan di ruang rapat semata, tetapi di pasar tradisional, gudang penyimpanan, jalur distribusi, dan sentra produksi hortikultura.

Ketiga, isu daya beli harus dibaca bersama kualitas pekerjaan. Pemerintah tidak cukup hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi perlu mendorong produktivitas dan **good jobs** yang memberikan pendapatan lebih stabil, perlindungan lebih baik, dan ruang peningkatan kesejahteraan. Temuan Bank Dunia tentang stagnannya pekerjaan berketerampilan tinggi dan meningkatnya lulusan universitas di pekerjaan berketerampilan rendah menunjukkan bahwa agenda industrialisasi, peningkatan keterampilan, reformasi jasa, dan formalitas ekonomi bukan isu jangka panjang yang abstrak, melainkan fondasi langsung bagi daya beli rumah tangga.

Keempat, transmisi penurunan suku bunga ke rumah tangga dan UMKM harus diperkuat. Selama bunga kredit masih bergerak lambat turun dan risiko UMKM tetap dianggap tinggi, maka pelonggaran moneter tidak akan sepenuhnya membantu lapisan produktif terbawah. Diperlukan kombinasi insentif kredit, penjaminan, pembiayaan berbagi risiko, dan penguatan data usaha kecil agar perbankan lebih percaya menyalurkan kredit dengan biaya yang lebih terjangkau. Di sinilah koordinasi BI, OJK, KSSK, dan pemerintah menjadi sangat penting. ([Bank Indonesia](#))

Kelima, perlindungan sosial perlu makin presisi dan adaptif terhadap inflasi biaya hidup. Ketika kemiskinan resmi turun, fokus kebijakan tidak boleh hanya pada penduduk miskin ekstrem, tetapi juga rumah tangga rentan di sekitar garis kemiskinan dan kelas pekerja bawah perkotaan. Mereka adalah kelompok yang paling cepat merasakan tekanan harga, tetapi sering tidak cukup miskin untuk dianggap prioritas utama. Kebijakan

bantuan yang sensitif terhadap lonjakan pangan dan utilitas akan lebih efektif daripada pendekatan yang terlalu umum.

Keenam, fungsi APBN sebagai shock absorber perlu diterjemahkan lebih tajam pada level mikro. Belanja negara yang tumbuh kuat pada awal 2026 menunjukkan ruang fiskal sedang dipakai untuk mendukung perekonomian. Namun rumah tangga akan menilai keberhasilan fiskal bukan dari presentasi konferensi pers, melainkan dari apakah harga pangan lebih terkendali, apakah bantuan tepat sasaran, apakah pekerjaan membaik, dan apakah biaya hidup menjadi lebih ringan. Efektivitas belanja, bukan hanya besarnya, menjadi kunci. ([Kemenkeu Media](#))

Penutup

Tekanan daya beli rumah tangga Indonesia pada 2026 adalah fenomena yang nyata dan rasional. Ia tidak harus dibaca sebagai bukti bahwa ekonomi nasional sedang runtuh. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa ketahanan makro belum otomatis berubah menjadi rasa aman mikro. Pada awal 2026, Indonesia memang masih memiliki fondasi pertumbuhan yang cukup baik: ekonomi 2025 tumbuh 5,11 persen, perdagangan surplus, konsumsi tetap berjalan, dan kepercayaan konsumen bertahan di zona optimistis. Namun rumah tangga tetap merasakan tekanan karena inflasi headline meningkat, harga pangan bergejolak, diskon listrik tahun lalu tidak lagi ada, pendapatan riil banyak keluarga bergerak lebih lambat daripada biaya hidup, bunga kredit belum turun banyak, dan pemulihan UMKM masih tidak merata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dengan demikian, pertanyaan “mengapa rumah tangga masih merasakan tekanan?” dapat dijawab sebagai berikut: karena yang dialami rumah tangga bukan sekadar inflasi statistik, melainkan penyempitan ruang fiskal domestik pada level keluarga. Mereka menghadapi pengeluaran pokok yang lebih berat, pendapatan yang tidak selalu naik sebanding, dan masa depan yang masih dibayangi ketidakpastian global. Daya beli, dalam makna yang paling konkret, adalah soal kemampuan bernapas di antara

pendapatan dan kebutuhan. Pada 2026, banyak rumah tangga Indonesia masih bisa berjalan, tetapi belum bisa bernapas lega.

Makalah ini karena itu menegaskan perlunya perubahan fokus dalam diskursus ekonomi Indonesia. Keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan, inflasi umum, atau surplus perdagangan, tetapi dari seberapa jauh rumah tangga merasa memiliki ruang aman untuk hidup, bekerja, merencanakan masa depan, dan menanggung risiko. Selama jurang antara resiliensi makro dan kenyamanan mikro masih lebar, maka tekanan daya beli akan tetap menjadi tema sentral ekonomi Indonesia, bahkan di tengah indikator nasional yang tampak baik.

Glosarium

Administered prices: kelompok harga yang dipengaruhi langsung oleh kebijakan pemerintah, seperti tarif listrik, transportasi tertentu, atau komponen energi tertentu.

BI-Rate: suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi sinyal utama arah kebijakan moneter.

Daya beli: kemampuan pendapatan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan.

Good jobs: pekerjaan dengan kualitas yang baik, umumnya dicirikan oleh produktivitas, kestabilan, perlindungan, dan tingkat upah yang memadai.

Headline inflation / inflasi umum: tingkat inflasi keseluruhan yang tercermin pada indeks harga konsumen.

Inflasi inti: komponen inflasi yang relatif lebih stabil, biasanya di luar harga pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah.

Low-base effect / efek basis rendah: kondisi ketika angka pertumbuhan atau inflasi tampak tinggi karena pembandingan tahun sebelumnya sangat rendah.

Ruang aman rumah tangga: cadangan keuangan atau fleksibilitas anggaran yang memungkinkan keluarga menghadapi kenaikan harga atau penurunan pendapatan.

UMKM: usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi basis penting penciptaan pendapatan dan kesempatan kerja di Indonesia.

Volatile food: kelompok bahan pangan yang harganya mudah berfluktuasi karena pengaruh musim, cuaca, distribusi, atau pasokan.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Januari 2026 sebesar 3,55 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026d). *BPS: Normalisasi tarif listrik dan inflasi emas penyebab utama inflasi Februari 2026*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026e). *Ekspor dan impor Indonesia Januari 2026 masing-masing tercatat USD 22,16 miliar dan USD 21,20 miliar*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026f). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026g). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026h). *November 2025: Tingkat Pengangguran*

Rudy C Tarumingkeng: Inflasi dan Daya Beli: Mengapa Rumah Tangga Indonesia Masih Merasakan Tekanan pada 2026

Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2026a). *IHK Januari 2026 mengalami deflasi*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026b). *Inflasi IHK Februari 2026 tetap terkendali*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026c). *Survei Konsumen Februari 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026d). *Laporan Survei Konsumen - Februari 2026*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026e). *Survei Penjualan Eceran Februari 2026: Penjualan eceran diperkirakan meningkat*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026f). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026g). *Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2026*. Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN Kita Februari 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Perkuat akses pembiayaan, OJK proyeksi kredit UMKM tumbuh 7-9 persen pada 2026*. Otoritas Jasa Keuangan.

World Bank. (2025). *Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia Country Growth and Jobs Report: Running faster, for longer: Structural transformation, productivity, and good jobs*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 1 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946>